



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SALINAN

Alamat : Jalan Bintang No. Kabupaten Pinrang 91212
Telp : (0421) 924804 Fax : (0421) 924804

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 011/HK.2-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 028/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/IX/2018 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA
BUKU KENDALI DAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a. Bawa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan pemberian Tunjangan Kinerja dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ;
- b. Bawa Saudara Naswar, SE selaku Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Pengelola Buku Kendali telah di tarik pertantuannya di Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 820/040/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Penarikan dan Penempatan PNS yang di pertantuan di Sekretariat KPU Kab. Pinrang;
- c. Bawa untuk mengisi kekosongan pejabat pengelola Buku Kendali, sebelum terbitnya Surat Keputusan Pergantian/Pengisian jabatan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik yang Defenitif, maka perlu ditunjuk salah satu Kasubag sebagai Pengelola Buku Kendali;
- d. Bawa untuk maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja Peawain dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 393);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008);

7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sitem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 tentang Perubahan Kedua atas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksanaan dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-11/PB/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 849/SJ/VI/2015 tentang Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 53/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Menunjuk/Menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan tugas masing-masing :

1. MUHAMMAD SAAD, SH
NIP. 197109072006041017
Pangkat : Penata Muda TK.I-III/b
2. NAHARIAH
NIP. 197608072007012019
Pangkat : Pengatur TK.I – II/d

KEDUA

: Tugas Pengelola Buku Kendali dan Tunjangan Kinerja adalah :

1. Pengelola Buku Kendali mempunyai tugas mengelola buku Kendali (mencatat dan melakukan Verifikasi terhadap kehadiran dan ketidak hadiran Pegawai) di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
2. Pengelola Data Tunjangan Kinerja mempunyai tugas menginput dan mengelola Data Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 10 Februari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum

Neneng Luthfiah Munir



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Tembusan: disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Kepegawaian, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang sebagai laporan, di Pinrang;
4. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
5. Pertinggal;